

**ANALISIS KEMANDIRIAN PEMBIAYAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAH HALMAHERA UTARA**

John F. Sonoto

*Program Studi Akuntansi, Universitas Hein Namotemo,  
Jalan Kompleks Pemerintahan Halmahera Utara Villa Vak I Tobelo, Halmahera Utara, 97762  
johnsonotounhena@yahoo.com*

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kinerja keuangan yang diperoleh dari pendapatan asli daerah dengan menggunakan alat analisis rasio keuangan dalam rangka penilaian tingkat kemandirian keuangan daerah Halmahera Utara dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, pada Pemerintah Daerah Halmahera Utara. Alat analisis yang digunakan adalah menggunakan analisis rasio keuangan yakni analisis rasio kemandirian, rasio efisiensi dan efektifitas serta analisis rasio aktivitas. Sampel yang baru dapat diperoleh dan digunakan adalah data keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Halmahera (APBD) Utara tahun 2008, 2009, dan 2010, sedangkan data tahun 2011. Kinerja Pendapatan Asli Daerah selalu dikaitkan dengan bagaimana kerja pemerintah daerah menggali potensi sumber daya yang dimilikinya untuk dapat membiayai penyelenggaraan pemerintah bagi kesejahteraan masyarakat Halmahera utara. Hasil penelitian perhitungan rasio keuangan (*Finansial Ratio*) pada APBD Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara periode 2008 – 2011, maka penulis menyimpulkan bahwa pemerintah kabupaten Halmaera Utara belum mandiri.

**Kata kunci :** rasio kemandirian, rasio efisiensi dan efektifitas, rasio aktivitas, rasio pertumbuhan dan rasio kontribusi

**ABSTRACT**

*The purpose of this study is to analyze the financial performance derived from local revenue by using the financial ratio analysis tool in order to assess the level of financial independence of North Halmahera region in financing the implementation of regional autonomy, to North Halmahera Regional Government. The analytical tool used is using financial ratio analysis that is the ratio of independence ratio, efficiency and effectiveness ratio and activity ratio analysis. The new samples can be obtained and used are North Halmahera Regional Budget (APBD) financial data in 2008, 2009, and 2010, while the data of 2011. Local Original Revenue Performance is always associated with how the local government works to explore the potential of its resources to be able to finance the government's administration for the welfare of the northern Halmahera community. Result of research of calculation of financial ratio (Finansial Ratio) at North Halmahera District Government's APBD period 2008-2011, hence writer conclude that North Halmaera regency government not yet independent.*

**Keywords:** independence ratio, efficiency and effectiveness ratio, activity ratio, growth ratio and contribution ratio.

**1. PENDAHULUAN**

Tahun anggaran 2011 Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara menganggarkan pos Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 115.910.969.500,00, realisasi pendapatannya sebesar Rp. 106.242.057.012,73 maka erjadi selisih sebesar Rp. 9.668.912.487,27. Selisih ini salah satunya disebabkan oleh pos pendapatan retribusi daerah

yang dianggarkan sebesar Rp. 20.370.769.500,00 dan terealisasi Rp. 6.835.576.925,00 sehingga terjadi selisih sebesar Rp. 13.535.192.575,00. Salah satu penyebab tidak mencapai target pos Pendapatan Asli Daerah tersebut adalah tidak realistisnya penyusun anggaran dalam menentukan target dari anggaran pendapatan yang akan dicapai. Seperti penganggaran pos Sumbangan Pihak

Ketiga yang di anggarkan sebesar Rp. 90.200.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 88.298.362.524,00. Realistis berarti anggaran pendapatan hendaknya disusun dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan/instansi dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara. Karenanya penyusunan anggaran tidak ada gunanya terlalu ambisius tanpa disertai dengan kemampuan dari instansi untuk mewujudkannya. Anggaran yang realistis adalah anggaran yang memperhitungkan kemampuan sumber daya perusahaan (Rudianto 2009 : 3).

Berdasarkan informasi yang tersedia maka dapat dilakukan analisis kinerja keuangan untuk menjamin dilakukannya pertanggungjawaban publik oleh pemerintah kepada masyarakat luas dan hasil dapat digunakan untuk menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur efisiensi dan efektifitas dalam merealisasikan pendapatan daerah dan mengukur sejauh mana aktifitas Pemerintah Daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.

## 2. Tinjauan Pustaka

### 2.1 Pengertian Anggaran

Salah satu aspek dari Pemerintah Daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Anggaran daerah adalah rencana kerja jangka pendek pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) dalam suatu periode tertentu (Mahmudi, 2011). Anggaran daerah atau anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Sebagai instrumen kebijakan anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektifitas pemerintah daerah. Anggaran pemerintah daerah (sektor publik) tidak jauh berbeda dengan karakteristik anggaran sektor swasta. Beberapa karakteristik dari suatu anggaran sebagai berikut :

1. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan
2. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, satu atau beberapa tahun
3. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan
4. Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang yang lebih tinggi dari pada penyusunan anggaran

Sekali disusun anggaran hanya dapat dirubah dalam kondisi tertentu

### 2.2 Tujuan dan Fungsi Anggaran Pemerintah

Anggaran pemerintah dibuat untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat seperti air bersih, kesehatan, pendidikan dan sebagainya agar terjamin layak. Tingkat kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh keputusan yang diambil oleh pemerintah melalui anggaran yang mereka buat.

Tujuan dari penyusunan anggaran pemerintah adalah :

1. Untuk menyatakan harapan/sasaran pemerintah secara jelas dan formal, sehingga bisa menghindari kerancuan dan memberi arah terhadap apa yang hendak dicapai pemerintah.
2. Untuk mengkomunikasikan harapan manajemen kepada pihak-pihak terkait sehingga anggaran mudah dimengerti, didukung dan dilaksanakan.
3. Untuk menyediakan rencana terinci mengenai aktifitas dengan maksud mengurangi ketidakpastian dan memberikan pengarahan yang jelas bagi individu dan kelompok dalam upaya mencapai tujuan perusahaan.
4. Untuk mengkoordinasikan cara/metode yang akan ditempuh dalam rangka memaksimalkan sumber daya.

### 2.3 Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran adalah laporan yang disusun secara sistematis tentang realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan selama suatu periode tertentu (Mursydi 2009). Laporan Realisasi Anggaran atau LRA mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD dengan menyajikan ikhtisar sumber alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan.

Penyandingan antara anggaran dan realisasi menunjukkan tingkat capaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Informasi tersebut berguna bagi pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas, dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran. Ruang lingkup LRA terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan

#### 2.4 Elemen-elemen Penerimaan Daerah

Berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sumber-sumber penerimaan terdiri atas :

- Pendapatan Asli Daerah;
- Dana Perimbangan;
- Pinjaman Daerah; dan
- Lain-lain Penerimaan yang Sah.

#### 2.5 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan adalah semua penerimaan kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pengelolaan penerimaan daerah harus dilakukan secara cermat, tepat, dan hati-hati. pemerintah daerah hendaknya dapat menjamin bahwa semua potensi penerimaan telah terkumpul dan dicatat ke dalam sistem akuntansi pemerintahan daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah perlu memiliki sistem pengendalian yang memadai untuk menjamin ditaatinya prosedur dan kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah perlu meneliti adakah penerimaan yang tidak disetor kedalam kas pemerintah daerah dan disalahgunakan oleh petugas di lapangan. Perlu juga diteliti masyarakat yang tidak membayar pajak dan pemberian sanksi atas tindakan penggelapan pajak.

Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri atas :

- Hasil pajak daerah;
- Hasil retribusi daerah;
- Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan; dan
- Lain-lain PAD yang sah.

Dalam struktur APBD baru dengan pendekatan kinerja, jenis pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan UU No. 34 Tahun 2000 dirinci sebagai berikut :

- Jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri atas :  
(i) Pajak Hotel, (ii) Pajak Restoran, (iii) Pajak Hiburan, (iv) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, dan (vii) Pajak Parkir.
- Retribusi dirinci menjadi : (i) Retribusi Jasa Umum, (ii) Retribusi Jasa Usaha, (iii) Retribusi Perijinan Tertentu

#### 2.6 Kinerja

Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi.

Apabila pencapaian sesuai dengan yang direncanakan, maka kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik. Apabila pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan dapat dikatakan kinerjanya sangat bagus. Apabila pencapaian tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau kurang dari apa yang direncanakan, maka kinerjanya jelek. Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan.

Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut. Menurut Halim (2001) analisis kinerja keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia.

#### 2.7 Pengukuran Kinerja Pemerintah

Pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi. Pendangan tradisional terhadap pengukuran kinerja organisasi sering hanya menekankan pada minimasi biaya (input), misalnya penghematan biaya operasional. Sistem pengukuran kinerja modern selain menilai input dan output juga menilai tingkat fleksibilitas organisasi melayani pelanggan. Dalam melakukan pengukuran kinerja pada pemerintah sudah seharusnya meninggalkan pandangan tradisional dan beralih ke pandangan modern. Hal ini karena semua jasa dan produk yang dihasilkan pemerintah ditujukan untuk memenuhi harapan dan keinginan masyarakat.

#### 2.8 Tujuan Pengukuran Kinerja Pemerintah

Pengukuran kinerja merupakan bagian penting dari proses pengendalian manajemen, baik organisasi publik maupun swasta. Tujuan dilakukannya pengukuran kinerja sektor publik antara lain :

1. Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi
2. Menyediakan sarana pembelajaran pegawai
3. Memperbaiki kinerja periode berikutnya
4. Menciptakan akuntabilitas publik

#### 2.9 Analisis Rasio Keuangan

Salah satu alat ukur kinerja adalah analisis rasio keuangan daerah yang merupakan inti

pengukuran kinerja sekaligus konsep pengelolaan organisasi pemerintah untuk menjamin dilakukannya pertanggungjawaban publik oleh lembaga-lembaga pemerintah kepada masyarakat luas. Hasil analisis rasio keuangan tersebut dapat digunakan untuk :

- Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah
- Mengukur efisiensi dan efektifitas dalam merealisasikan pendapatan daerah.

Mengukur sejauh mana aktifitas Pemerintah Daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.

### 2.10 Jenis Rasio Keuangan

Beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD antara lain :

#### 2.10.1 Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian keuangan daerah atau yang sering disebut sebagai otonomi fiskal menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio ini juga menggambarkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio ini, maka tingkat ketergantungan daerah terhadap pihak eksternal semakin rendah, begitu pula sebaliknya. Rasio kemandirian diukur dengan :

$$RK = \frac{PAD}{Bp4}$$

Keterangan :

- RK : Rasio Kemandirian
- PAD : Pendapatan Asli Daerah
- BP4 : Bantuan pemerintah pusat/propinsi & pinjaman

#### 2.10.2 Rasio Efektivitas dan Efisiensi

Pengertian efektifitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Rasio efektifitas

menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin besar realisasi penerimaan PAD dibanding target penerimaan PAD, maka dapat dikatakan semakin efektif, begitu pula sebaliknya. Rasio efektifitas diukur dengan :

$$Ref = \frac{RPPAD}{TPPAD}$$

Keterangan :

- Ref : Rasio Efektivitas
- RPPAD : Realisasi PAD
- TPPAD : Target Penerimaan PAD yang ditetapkan berdasarkan potensi Riil daerah

Nilai Efektivitas diperoleh dari perbandingan sebagaimana tersebut diatas, diukur dengan kriteria penilai kinerja keuangan. Apabila persentase kinerja keuangan diatas 100% dapat dikatakan sangat efektif, 90-100% adalah Efektif, 80-90% adalah cukup Efektif, 60-80% adalah kurang Efektif dan kurang dari 60% adalah tidak Efektif.

Untuk memperoleh ukuran yang lebih baik, rasio ini dibandingkan dengan rasio efisiensi. Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Semakin kecil rasio efisiensi, maka akan semakin baik kinerja pemerintah daerah.

$$Refi = \frac{BMPAD}{RPPAD}$$

Keterangan :

- Refi : Rasio Efisiensi
- BMPAD : Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD
- RPPAD : Realisasi Penerimaan PAD

Dengan mengetahui hasil perbandingan antara realisasi pengeluaran dan realisasi penerimaan dengan menggunakan ukuran efisiensi tersebut, maka penilaian kinerja keuangan dapat ditentukan. Apabila rasio keuangan diatas 100% ke atas dapat

dikatakan tidak efisien, 90% - 100% adalah kurang efisien, 80%-90% cukup efisien, 60%-80% adalah efisien dan dibawah dari 60% adalah sangat efisien.

Faktor penentu efisiensi dan efektifitas sebagai berikut (Budiarto, 2007) :

- Faktor sumber daya, baik sumber daya manusia seperti tenaga kerja, kemampuan kerja maupun sumber daya fisik seperti peralatan kerja, tempat bekerja serta dana keuangan;
- Faktor struktur organisasi, yaitu susunan yang stabil dari jabatan-jabatan, baik itu struktural maupun fungsional;
- Faktor teknologi pelaksanaan pekerjaan;
- Faktor dukungan kepada aparatur dan pelaksanaannya, baik pimpinan maupun masyarakat;

Faktor pimpinan dalam arti kemampuan untuk mengkombinasikan keempat faktor tersebut kedalam suatu usaha yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai sasaran yang dimaksud.

### 2.10.3 Rasio Aktivitas

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja pembangunan secara optimal.

$$RBP = \frac{TBP}{TAPBD}$$

Keterangan :

- RBP : Rasio belanja pembangunan terhadap APBD  
TBP : Total belanja pembangunan  
TAPBD : Total APBD

### 2.10.4 Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)

Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen penerimaan (PAD dan total pendapatan) dan pengeluaran (belanja pembangunan).

$$RPPAD = \frac{RPPAD X_n - X_n - 1}{RPPAD X_n - 1}$$

$$RP\Sigma P = \frac{RP\Sigma P X_n - X_n - 1}{RP\Sigma P X_n - 1}$$

$$RPBP = \frac{RBP X_n - X_n - 1}{RBP X_n - 1}$$

Keterangan :

- RPPAD : Rasio Pertumbuhan PAD  
RPPAD : Realisasi Penerimaan PAD  
RP\Sigma P : Rasio Pertumbuhan \(\Sigma\) Pendapatan  
RP\Sigma P : Rasio Penerimaan \(\Sigma\) Pendapatan  
RPBP : Rasio pertumbuhan belanja pembangunan  
RBP : Realisasi belanja pembangunan  
X<sub>n</sub> : Tahun yang dihitung  
X<sub>n-1</sub> : Tahun Sebelumnya

### 2.10.5 Rasio Kontribusi

Rasio Kontribusi ini dipergunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan komponen dalam PAD terhadap pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya dalam presentase, dapat dihitung dari realisasi jumlah pajak/retribusi daerah dibandingkan dengan jumlah PAD pada tahun anggaran yang sama.

$$\text{Rasio Kontribusi} = \frac{\text{Jumlah Pajak dan Retribusi}}{\text{Jumlah PAD}}$$

## 3. METODE PENELITIAN

### 3.1. Rancangan Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kuantitatif yang dilakukan terhadap kinerja APBD Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara. Data-data yang telah dikumpulkan akan dianalisis dengan menggunakan analisis rasio kinerja yang dikembangkan oleh Halim (2002:128-135) dan telah digunakan oleh setyawan (2003) meliputi (1) rasio Kemandirian; (2) Rasio Efektifitas dan Efisiensi; (3) Rasio Aktivitas/Keserasian; (4) Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio) (5) Rasio Kontribus.

### 3.2. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Halmahera Utara, dan penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset daerah (DPPKAD). Dalam penelitian ini penulis memilih kabupaten Halmahera Utara dengan alasan penulis berdomosili di Kabupaten Halmahera Utara sehingga memudahkan dalam pengambilan data.

### 3.3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), beserta realisasi Kabupaten Halmahera Utara. Sampel dalam penelitian ini adalah APBD Kabupaten Halmahera Utara mulai tahun 2008, 2009, 2010 dan APBD tahun 2011.

### 3.4. Instrumen Penelitian

Variabel kinerja pendapatan asli daerah dapat dilakukan menggunakan rasio-rasio keuangan yang telah teruji keandalannya. Dalam penelitian ini rasio keuangan yang digunakan adalah rasio kemandirian, rasio efektifitas, dan rasio efisiensi. Rasio Kemandirian dapat diukur dengan rumus total Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan total pendapatan. Rasio efektifitas diukur dengan rumus realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan target penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Rasio efisiensi diukur dengan rumus realisasi pengeluaran dibagi dengan realisasi penerimaan. Rasio Pertumbuhan dapat diukur dengan komponen penerimaan (PAD dan total pendapatan) dan pengeluaran (belanja pembangunan) dan Rasio kontribusi dapat dihitung dari realisasi jumlah pajak/retribusi daerah dibandingkan dengan jumlah PAD pada tahun anggaran yang sama.

### 3.5. Prosedur Pengambilan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data sekunder yang merupakan data yang

telah diolah oleh objek yang diteliti berupa Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Periode anggaran 2008, 2009, 2010 dan 2011 dan dokumen-dokumen lain yang dihasilkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Halmahera Utara.

### 3.6. Teknik Analisis Data

Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi deskriptif, yaitu untuk menjelaskan karakteristik subyek yang diteliti, mengkaji berbagai aspek dalam fenomena tertentu dan menawarkan ide masalah untuk pengujian atau penelitian selanjutnya (Indriantoro & Supomo, 1999).

Data yang berasal dari APBD kemudian dianalisis dengan menggunakan rasio keuangan daerah yang diukur dengan menggunakan rumus perhitungan.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Hasil Perolehan Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan data keuangan yang diperoleh tahun anggaran 2008, 2009, dan 2010, 2011 maka kinerja keuangan yang dapat dihitung menurut rumusan rasio-rasio keuangan adalah sebagai berikut:

#### 1. Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian diukur dengan membandingkan antara realisasi pendapatan asli daerah (PAD), dengan Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi dan Pinjaman. Berikut pada tabel 4.1 ditunjukkan tentang rasio kemandirian yang berhasil dicapai oleh kabupaten Halmahera Utara selama kurun waktu ± 4 tahun berturut-turut.

Tabel 4.1  
Rasio Kemandirian

RAT IO	PERSAM AAN	2008		2009		2010		2011	
RK	PAD	19,612,295, 878	5.0%	15,181,573, 628	3.8%	55,197,347, 421	17.7%	105,671,959 ,398	24,65%
	BP4	396,141,155 ,216		399,063,015 ,625		311,963,771 ,388		428,618,468 ,694	

Sumber data: data olahan, 2014

Berdasarkan data realisasi pendapatan asli daerah (PAD), dan informasi tentang Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi dan

Pinjaman pada Pemerintah Kabupaten Halmahera selama 4 Tahun, maka menunjukkan bahwa Realisasi Anggaran

mengalami fluktuatif namun cenderung naik. Tahun 2008 dicapai rasio kemandirian sebesar 5 %, sedangkan tahun 2009 menurun menjadi 3,80 %, Tahun 2010 mengalami kenaikan menjadi 17,7 %, tahun 2011 kenaikannya cukup signifikan yakni 24,65%.

Pencapaian ini dapat memberikan gambaran kepada kita bahwa Pemda Halmahera Utara belum mencapai sama dengan atau diatas 50%. Artinya belum banyak intensifikasi PAD yang dicetuskan untuk menambah PAD, Pemda Halut

masih banyak berharap adanya subsidi Pemerintah Propinsi atau Pemerintah pusat. Hal ini menarik jika kemandirian ini dihubungkan dengan kinerja eksekutif dan legislatif untuk menghasilkan intensifikasi bagi pertumbuhan sektor-sektor riil di Halmahera Utara.

## 2. Rasio Efektivitas dan Efisiensi

Rasio efektifitas merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan PAD dengan target PAD yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Tabel 4.2  
Rasio Efektivitas

RATIO	PERSAMAAN	2008		2009		2010		2011	
Ref	PAD	19,612,295,878	62.1%	15,181,573,628	37.7%	55,197,347,421	82.3%	105,671,959,398	91.2%
	TPPAD	31,573,514,562		40,246,867,547		67,053,727,758		115,910,969,500	

Rasio efektifitas mengalami penurunan pada tahun anggaran 2009. Rasio Efektivitas tahun anggaran 2008 sebesar 62,12 %, tahun 2009 menurun menjadi 37,72 %, dan pada tahun anggaran 2010 mengalami peningkatan menjadi 82,32 %. Sedangkan tahun 2011 cukup signifikan kenaikannya. Rasio efektifitas 91,2% memberi signal bahwa pemerintahnya melakukan banyak

ketepatan-ketepatan dalam bereproduksi pada segala bentuknya.

Rasio ini perlu didukung dengan rasio efisiensi yang menunjukkan bahwa pemerintah serius melaksanakan *Value for Money*. Rasio ini dapat menyatakan kepada kita seberapa besar pemerintah daerah melaksanakan efisiensi dalam memberikan layanan prima kepada masyarakat. Ketepatan melakukan penghematan.

Tabel 4.3  
Rasio Efisiensi

RATIO	PERSAMAAN	2008		2009		2010		2011	
Ref	BMPAD	0.0%	0.0%	537,856,138	3.5%	1,088,962,057	2.0%	1,014,648,100	1.0%
	BP4			15,181,573,628		55,197,347,421		105,671,959,398	

Rasio Efisiensi merupakan perbandingan antara biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD dengan realisasi penerimaan pendapatan Asli Daerah. Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD adalah jumlah/total pengeluaran anggaran dalam rangka memungut pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Sedangkan realisasi penerimaan PAD adalah jumlah/total PAD yang diperoleh pada tahun anggaran yang bersangkutan. Rasio Efisiensi mengalami kecenderungan menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun anggaran 2008 Pemerintah Daerah tidak menganggarkan Biaya pemungutan PAD sehingga tidak diperoleh perhitungan, tahun anggaran 2009 rasio Efisiensi 3,54 %, dan tahun anggaran 2010 mengalami

penurunan menjadi 1,97 %. Tahun 2011 prinsip efisiensi berhasil di kelola dengan baik 1,0%. Semakin kecil rasio efisiensinya menunjukkan bahwa Pemda Halut semakin efisien. Efisiensi bukan berarti melemahkan pelayanan public.

### 3. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja pembangunan secara optimal. Tabel 4.4 memberikan gambaran pencapaian belanja pembangunan dan pendapatan belanja daerah.

Tabel 4.4  
Rasio Aktivitas

RATIO	PERSAMAAN	2008		2009		2010		2011	
Ref	TBP	163,218,24 1,837	37.8%	129,935,028,899	31.7%	112,459,798,74 2	28.7%	156,847,351,2 58	31.2%
	TAPBD	431,442,26 5,175				410,383,293,592		392,082,400,21 0	

Keterangan :

- RBP : Rasio belanja pembangunan terhadap APBD
- TBP : Total belanja pembangunan
- TAPBD : Total APBD

Rasio aktivitas antara tahun 2008 – 2011 mengalami fluktuasi. Rasio aktivitas tahun anggaran 2008 sebesar 37,83% tahun 2009 rasio aktivitas menurun menjadi 31,66%, dan tahun 2010 mengalami penurunan kembali menjadi 28,68%. Tahun 2011 rasio aktivitasnya sebesar 31,2%. Hal ini menunjukkan bahwa

belanja modal atau pembiayaan untuk membangun secara fisik masih berada disekitar 30an%. Artinya belum menjadi prioritas dalam aktivitas pembangunan di kabupaten Halmahera utara.

### 4. Rasio Pertumbuhan

Tabel 4.5  
Rasio Pertumbuhan PAD

RATIO	PERSAMAAN	2008		2009		2010		2011	
Ref	RPΣP	-	0.0 %	(4,430,722,250)	-22.6%	40,015,773,793	263.6%	51,045,128,175	92.5%
	RPΣP	-		19,612,295,878		15,181,573,628		55,197,347,421	

Keterangan :

- RPPAD : RasioPertumbuhan PAD
- RPPAD : RealisasiPenerimaan PAD
- RPΣP : RasioPertumbuhan Σ Pendapatan
- RPΣP : RasioPenerimaan Σ Pendapatan
- Xn : Tahun yang dihitung
- Xn-1 : TahunSebelumnya

Rasio Pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Rasio pertumbuhan PAD dari

tahun ke tahun. Rasio pertumbuhan pada tahun 2008 belum dapat diketahui karena keterbatasan data tahun anggaran 2007. Rasio pertumbuhan PAD Tahun 2009 sebesar -22,59% dan pada tahun 2010 naik drastis menjadi 263,5%. Tahun 2011

sebesar 92,5%. Rasio ini menunjukkan bahwa fluktuasi naik turun adalah hal yang biasa, namun Pemerintah Daerah belum memiliki kemampuan mengelolah pertumbuhan dan penerimaan atas

pendapatan yang diperoleh karena selisih naik maupun turun masih terlalu curam. Pada tabel 4.6 kita akan melihat rasio pertumbuhan dan pendapatan.

Tabel 4.6  
Rasio Pertumbuhan dan Pendapatan

RATIO	PERSAMAAN	2008		2009		2010		2011	
		Ref	RPSP	-	0.0%	(1,508,861,841)	-0.4%	(47,083,470,444)	-11.4%
		-	%	415,753,451,094		414,244,589,253		367,161,118,809	

Rasio pertumbuhan atas pendapatan menunjukkan bahwa tahun 2009 sebesar -0,4%, tahun 2010 mengalami penurunan menjadi -11,37%. Dan tahun 2011 telah mencapai nilai positif yakni sebesar 45.7%. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pertumbuhan sangat dipengaruhi oleh pendapatan yang signifikan.

Rasio Kontribusi ini dipergunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan komponen dalam PAD terhadap pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya dalam presentase, dapat dihitung dari realisasi jumlah pajak/retribusi daerah dibandingkan dengan jumlah PAD pada tahun anggaran yang sama. Tabel 4.7 memberikan gambaran ringkas tentang rasio kontribusi kabupaten halmahera utara.

## 5. Rasio Kontribusi

Tabel 4.7  
Rasio Kontribusi Pajak dan PAD

RATIO	PERSAMAAN	2008		2009		2010		2011	
Ref	Pajak & Retribusi	7,381,829,661	37.6%	2,496,943,120	16.4%	6,442,102,964	11.7%	35,320,142,720	33.4%
	PAD	19,612,295,878		15,181,573,628		55,197,347,421		105,671,959,398	

Rasio kontribusi Pajak dan PAD Pemerintah Halmahera Utara cenderung mengalami penurunan. Tahun Anggaran 2008 sebesar 37,6%, tahun 2009 menurun menjadi 16,45% dan tahun 2010 mengalami penurunan kembali menjadi 11,6%, tahun 2011 mengalami kenaikan signifikan yakni sebesar 33,4%.

Jika diperhatikan ada kecenderungan yang menarik pada penerimaan yang berasal dari pajak dan retribusi. Atas kenaikan tersebut dapat dipastikan bahwa Pemda telah memiliki keyakinan bahwa sektor pajak harus dilakukan pengawalan ketat pada pemungutan dan juga pembentukan perda yang mendukung pemda mengusahakannya. Karena dengan adanya otonomi secara perundang-undangan adanya sinergisme antara pusat dan daerah

dalam meningkatkan layanan prima bagi terselenggaranya *good governance*.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1. Kesimpulan

Kinerja Pendapatan Asli Daerah selalu dikaitkan dengan bagaimana kerja pemerintah daerah menggali potensi sumber daya yang dimilikinya untuk dapat membiayai penyelenggaraan pemerintah bagi kesejahteraan masyarakatnya. Hasil penelitian perhitungan rasio keuangan (*Finansial Ratio*) pada APBD Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dengan data keuangan periode 2008 – 2011, maka penulis menyimpulkan bahwa pemerintah belum mandiri.

## 5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran sementara yang dapat diberikan penulis adalah Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah, dengan melakukan justifikasi dan mendorongnya pada aspek legal sehingga kehadiran legislator di Pemda dapat berfungsi sebagai pembuat produk-produk peraturan daerah dalam rangka keniscayaan bagi halmahera utara.

*Keuangan Daerah Pemerintah Kota Malang Dilihat dari Perspektif Akuntabilitas. Balance* Volume 1 No.1 Agustus 2003

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*

## DAFTAR PUSTAKA

- Bastian Indra. 2001. *Akuntansi Sektor Publik*, Erlangga, Jakarta
- Halim, Abdul dan Syukriy Abdullah. 2006. Hubungan dan masalah keagenan di pemerintahan daerah: sebuah peluang penelitian anggaran dan akuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintah* 2(1): 53-64
- Indrianto dan Supomo. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*, BPFE, Yogyakarta.
- Mahmudi, 2011. *Akuntansi Sektor Publik*, UII Press, Yogyakarta
- Mahmudi, 2007. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta
- Mahmudi, 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP AMP YKPN, Yogyakarta
- Mahsun Mohamad, 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, BPFE Yogyakarta
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*, ANDI, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. ANDI, Yogyakarta.
- Rudianto. 2009. *Penganggaran*, Erlangga, Jakarta
- Setyawan, S. 2003. *Pengukuran Kinerja*